



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## RENDAHNYA REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH MENJELANG AKHIR TAHUN 2023

**Eka Budiyantri**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
*eka.budiyantri@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Memasuki akhir tahun 2023, realisasi anggaran belanja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, belum terserap maksimal. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.662,38 triliun atau sekitar 74 persen. Belanja pemerintah pusat (K/L) yang cukup terlihat adalah dari pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bantuan sosial. Sementara realisasi belanja non-K/L disalurkan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi listrik, subsidi dan kompensasi BBM, subsidi LPG 3 kg, program Kartu Prakerja, serta subsidi perumahan.

Realisasi belanja pemerintah daerah mencapai Rp820,71 triliun. Artinya, realisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah baru mencapai 64 persen. Dalam hal ini belanja pemerintah daerah digunakan untuk melakukan perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.

Dengan masih rendahnya penyerapan anggaran, artinya akan ada uang sebesar triliunan rupiah yang keluar di tiga minggu terakhir tahun 2023 ini. Kondisi penumpukan realisasi di akhir tahun seperti ini sudah kerap terjadi. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang. Menurutnya, lambatnya eksekusi realisasi anggaran salah satunya disebabkan oleh proses perencanaan dari belanja itu sendiri. Seperti diketahui, proses perencanaan belanja APBN di tahun berjalan dilakukan di tahun sebelumnya. Seharusnya pada proses perencanaan tersebut, sudah mendetailkan bagaimana kemudian eksekusi dari beragam pos belanja akan dilakukan di tahun berikutnya. Termasuk di dalamnya eksekusi yang lebih cepat di awal tahun. Hal ini diperlukan untuk memastikan periode belanja bisa terpenuhi dalam satu tahun penuh tahun anggaran.

Perencanaan yang kurang matang juga menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran. Padahal perencanaan merupakan faktor penting untuk melihat bagaimana mitigasi dan proses pemantauan dan evaluasi yang akan dilakukan instansi. Jika dilihat dari beberapa postur belanja, pos belanja rutin seharusnya tidak punya dinamika yang sangat tinggi ketika dieksekusi. Jadi seharusnya masalah realisasi di belanja rutin bisa terselesaikan di periode tahun sebelum anggaran itu dijalankan karena pemerintah sudah punya pengalaman dalam mengatur belanja tersebut.

Selain perencanaan, proses monitoring dan evaluasi (monev) juga menjadi penting untuk memastikan ketika tahun anggaran telah berjalan tidak ada proyek yang terhambat. Artinya, pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi untuk mengatasi dampak dari terhambatnya proyek yang berjalan. Kendati begitu, memang secara catatan bisa saja mitigasi yang dilakukan itu tidaklah mudah, sehingga penumpukan realisasi belanja di akhir tahun kembali terulang di periode APBN tahun berjalan.

Pada tahun 2024, APBN menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun. Sementara itu, untuk belanja negara ditetapkan Rp3.325,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun (naik 8,6 persen) dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp857,6 triliun (naik 5,3 persen). Jika pemerintah tetap lambat dalam penyerapan anggaran, maka akan lebih sulit mewujudkan realisasi anggaran yang optimal.

## Atensi DPR

Permasalahan lambatnya penyerapan anggaran baik pusat maupun daerah terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk dapat segera mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, atensi yang dapat dilakukan DPR RI khususnya Komisi XI, yaitu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyerapan anggaran pada program-program pembangunan pemerintah yang sedang berjalan. Selain itu Komisi XI juga perlu mendorong pemerintah agar dapat segera melakukan eksekusi terhadap anggaran yang telah dialokasikan dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Mengingat kondisi geopolitik yang makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis yang makin menguat, maka Komisi XI juga perlu mengingatkan pemerintah agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.

## Sumber

bisnis.com, 29 November 2023;  
cnbcindonesia.com, 29 November 2023;  
*Kompas*, 30 November 2023;  
kompas.com, 29 November 2023;  
republika.co.id, 30 November 2023;  
tirto.id, 30 November 2023.